

PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM SISTEM MANAJEMEN ASN DI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Oleh: Arfiani Haryanti

PENDAHULUAN

Teknologi informasi merupakan istilah umum yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, serta menyebarkan informasi. Perkembangan teknologi merupakan tuntutan zaman yang tidak bisa dipungkiri untuk diikuti oleh khalayak publik. Teknologi yang dahulunya hanya angan-angan kini berubah menjadi suatu ketergantungan yang sulit dihindarkan publik. Teknologi memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan manusia, yang secara langsung membuat ketergantungan pada teknologi. Kecanggihan teknologi mempermudah semua aspek kehidupan manusia, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Teknologi bukan hanya memberikan manfaat secara fungsionalnya, namun juga memberikan fleksibilitas bagi penggunaannya. Penerapan teknologi dapat memudahkan pekerjaan,

mempersingkat jarak, serta menjalin komunikasi tanpa batas ruang dan waktu.

Dalam sektor publik perkembangan teknologi informasi menjadi kebutuhan dan tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Banyak instansi pemerintah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan publik untuk mempermudah pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, dan akurat. Perkembangan dan penerapan teknologi informasi sangat berperan besar dalam perubahan pola pikir dan pola kerja instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang pada awalnya identik dengan birokrasi rumit, lambat, dan berbelit perlahan berubah menjadi birokrasi yang *simple* dan *online*, yang membawa dampak positif pada percepatan pelayanan publik. Selain itu dengan memanfaatkan teknologi informasi kebutuhan komunikasi dan akomodasi antara pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih rasional dan murah. Hal ini memungkinkan pemerintah dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat tanpa terkendala ruang dan waktu.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan salah satu instansi pemerintah yang menerapkan manajemen ASN digital berbasis teknologi informasi untuk menciptakan pelayanan

Ringkasan Eksekutif

- Penerapan Teknologi Informasi (TI) akan menghubungkan satu dengan lainnya tanpa batas ruang dan waktu, sehingga mempermudah akses komunikasi.
- Teknologi informasi akan membantu setiap manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, serta menyebarkan informasi.
- Kemajuan teknologi informasi merupakan solusi bagi semua penyelenggara pelayanan publik termasuk manajemen ASN dalam rangka memenuhi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
- Penyelenggaraan sistem manajemen ASN berbasis TI perlu dikembangkan untuk tersedianya data dan informasi ASN yang dapat dimanfaatkan secara cepat, akurat, dan aman.

Penanggungjawab : Margi Prayitno
Pimpinan Redaksi : Ajib Rakhmawanto
Editor : Tobirin
Design Grafis : Santosa
Sekretariat : Heri Noviyanto
Sirkulasi : Hamid Munawan
Alamat : Jl. Letjend Sutoyo No.12 Cililitan Jakarta Timur
Telp/e-mail : 021-80887011/puslitbang_bkn@yahoo.com

ASN. Disamping untuk mempermudah pelayanan ASN, penerapan teknologi informasi manajemen ASN digunakan dalam rangka pengambilan keputusan strategis. BKN sebagai instansi penyelenggara negara telah menerapkan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan manajemen ASN dalam mendukung peran, tugas pokok, dan fungsinya. Bagaimanakah BKN menerapkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen ASN? Apa saja produk-produk teknologi informasi yang dikembangkan BKN, dan apa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan teknologi informasi di BKN?



PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI

BKN memahami pentingnya peranan teknologi informasi dalam mendukung percepatan pelayanan kepegawaian, khususnya dalam penyelenggaraan manajemen ASN. Pelayanan ASN yang paling dasar tentunya bagaimana dapat menyajikan informasi yang akurat terhadap keberadaan, jumlah, dan identitas ASN. Program pertama yang dilakukan BKN adalah dengan melakukan pendataan PNS dengan metode Electronic Pendataan Ulang Pegawai Negari Sipil (E PUPNS). Tujuan E PUPNS adalah untuk memutakhirkan data PNS, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memunculkan informasi atas jumlah dan kualifikasi kompetensi yang dimiliki PNS. Disamping melakukan pendataan PNS, BKN mengagendakan beberapa pelayanan manajemen ASN berbasis teknologi, seperti; Sistem Aplikasi Unifikasi Anggaran (SIAVA), Sistem Informasi Online Inventory (SI ONI), E Journal, E Kinerja, dan lain sebagainya. Sebelumnya BKN juga telah berhasil menerapkan teknologi dalam pelayanan rekrutmen dan pengembangan pegawai ASN, yaitu; Computer Assisted Test (CAT) serta pelayanan mutasi, kenaikan pangkat, dan pensiun dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) *online*.

Berikut adalah beberapa inovasi pelayanan manajemen ASN berbasis teknologi yang diunggulkan dalam mendukung percepatan pelayanan manajemen ASN:

Tabel Produk dan Penerapan Teknologi Pelayanan Manajemen ASN Di BKN

NO	NAMA PRODUK	DIKEMBANGKAN OLEH UNIT	TUJUAN
1	SIAVA (<i>Sistem Aplikasi Unifikasi Anggaran</i>)	Biro Keuangan	Mewujudkan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
2	SI ONI (<i>Sistem Informasi Online Inventory</i>)	Biro Umum	Pengelolaan barang pakai habis secara transparan dan akuntabel.
3	<i>Jurnal Civil Service</i>	Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian	Pengembangan <i>knowledge management</i> .
4	AC (<i>Assessment Center</i>)	Pusat Penilaian Kompetensi PNS	Penilaian kompetensi PNS dalam rangka pengembangan karier PNS dan konseling psikologi.
5	E-Lapkin (<i>Laporan Kinerja secara Elektronik</i>) <i>Coaching Clinic</i>	Direktorat Kinerja ASN	Pelaporan penilaian prestasi kerja PNS. Layanan konsultasi dalam rangka meningkatkan pelayanan PNS
6	SSCN-BKN (<i>Sistem Seleksi CPNS Nasional</i>)	Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	Pendaftaran CPNS secara serentak dan terintegrasi melalui sistem <i>online</i> .
7	SAPK <i>online</i> (<i>Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian</i>)	Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	Memberikan layanan kepegawaian berbasis <i>online</i> yang menggunakan satu basis data PNS.
8	CAT (<i>Computer Assisted Test</i>)	Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN	Mewujudkan tuntutan masyarakat dalam rekrutan PNS yang adil dan transparan.

(Sumber: <http://www.bkn.go.id/produk>)

MANFAAT DAN KENDALA

Pemanfaatan teknologi informasi dalam perspektif *e-Government* umumnya dipakai untuk mengolah data sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Banyak manfaat yang didapatkan dari beberapa penerapan teknologi informasi dalam pelayanan manajemen ASN di BKN, antara lain:

1. Peningkatan kualitas layanan kepegawaian secara *online* sehingga publik mendapatkan layanan kapan saja dan dimanapun tanpa perlu datang ke kantor BKN.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BKN sebagai penyelenggara manajemen ASN dengan penyelenggaraan tes rekrutmen CPNS dengan sistem CAT yang menutup celah praktek KKN.
3. Penyelenggaraan manajemen ASN secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga menghilangkan birokrasi yang rumit, berbelit, lama, dan lain sebagainya.
4. Sistem penyelenggaraan manajemen ASN terpadu melalui jaringan sistem informasi *online* antar instansi pemerintah baik Pusat dan Daerah, guna mengakses seluruh data dan informasi pelayanan pegawai ASN.



Sedangkan kendala umum yang terjadi dalam penerapan teknologi informasi penyelenggaraan manajemen ASN di BKN adalah sebagai berikut:

- Kurangnya dukungan SDM PNS.
- Pengembangan dan penerapan teknologi tidak didukung dengan perencanaan yang baik.
- Pengembangan teknologi informasi manajemen ASN masih sulit terintegrasi.
- Belum adanya standarisasi *platform* dan spesifikasi produk teknologi informasi.
- Teknologi informasi yang dikembangkan minim sosialisasi kepada penggunanya (*user*).
- Minimnya kebijakan terkait penerapan teknologi informasi manajemen ASN.

PENUTUP

Banyak faktor yang harus diperhatikan oleh BKN untuk menjadi instansi yang “*high technology*” dalam penyelenggaraan manajemen ASN dari aspek sarana, prasarana, dan SDM. Penerapan teknologi aplikasi manajemen ASN dalam mendukung pelayanan kepegawaian secara umum akan berhasil dengan baik bila terdapat sarana dan SDM yang memadai. Sistem manajemen ASN kurang didesign secara terintegrasi dengan unit instansi lain sehingga masih menyebabkan *mismatch* dalam pelayanan manajemen ASN secara umum. Diperlukan perencanaan dalam penerapan teknologi informasi yang tepat, seperti adanya sosialisasi berkelanjutan terhadap penerapan sistem informasi dan aplikasi yang telah dibangun, serta melakukan koordinasi dengan semua instansi terkait. Penerapan teknologi informasi secara terpolo dan terencana bagi BKN akan dapat membawa dampak positif bagi peningkatan profesionalitas pegawai ASN.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- Diterbitkan beberapa kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan BKN.
- Disusun dokumen perencanaan untuk memudahkan dalam penetapan arah kebijakan teknologi informasi.
- Membuat standar, skala prioritas, arah, dan kebijakan strategis terkait program teknologi informasi.
- Menetapkan indikator yang terukur dalam setiap program kegiatan penerapan teknologi informasi.
- Melakukan kerjasama maupun *benchmarking* dengan institusi lain untuk meningkatkan layanan kepegawaian dalam manajemen ASN.
- Pemenuhan dan peningkatan kualitas SDM/pegawai dilingkungan BKN.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara*

Haryanti, Arfiani. 2013. *Pengukuran Tingkat Kapabilitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Rekomendasi Perbaikan Berdasarkan Kerangka Kerja Cobit 5: Studi Kasus Badan Kepegawaian Negara*. Tesis S2 (tidak diterbitkan), Jakarta: Universitas Indonesia

<http://www.bkn.go.id/produk>

Badan Kepegawaian Negara. 2015. *Rencana Strategis (Renstra) BKN Tahun 2015-2019*. Jakarta: BKN

